

**IMPLEMENTASI PROGRAM DAPUR SEHAT ATASI STUNTING DI
KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS**¹Yunita Sofiyati, ²Oti Kusumaningsih¹FISIP Universitas Wijayakusuma Purwokerto²FISIP Universitas Wijayakusuma Purwokerto¹sofie99074@gmail.com ²oti.kusumaningsih.msi@gmail.com

ABSTRAK

Masalah stunting sampai saat ini masih menjadi isu yang sering diperbincangkan dan penanganannya menjadi prioritas nasional. Pemerintah membuat kebijakan Percepatan Penurunan Stunting yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Salah satu turunan dari kebijakan tersebut adalah adanya program Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Program Dapur Sehat Atasi Stunting di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Dapur Sehat Atasi Stunting di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kekurangan dari aspek yang diteliti. Dari aspek komunikasi sudah dilaksanakan dengan baik terlihat dari proses tranmisi dari implementor kepada kelompok sasaran, metode sosialisasi dan intensitas komunikasi sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian, pada aspek sumber daya ini masih kurang memadai, terutama pada sumber daya anggaran karena di Desa Cindaga belum mengalokasikan anggaran untuk program DAHSAT. Selanjutnya pada aspek disposisi juga masih kurang baik, hal ini dikaitkan dengan karakter para pelaksana, untuk kader sudah memiliki karakter komitmen dan tanggungjawab sedangkan untuk Pemerintah Desa Cindaga disinyalir belum memiliki komitmen untuk program DAHSAT karena belum mengalokasikan APBDesnya. Sedangkan aspek struktur birokrasi juga belum dilaksanakan dengan baik, hal ini terjadi karena belum adanya legalitas bagi Tim DAHSAT.

Kata Kunci; DAHSAT, implementasi, stunting.

A. PENDAHULUAN

Masalah stunting sampai hari ini masih menjadi isu yang sangat hangat diperbincangkan, bahkan penanganannya sampai menjadi prioritas nasional. Stunting menjadi ancaman besar bagi masa depan bangsa dan negara karena stunting berkaitan dengan keberlanjutan kualitas generasi penerus bangsa. Stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru

akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. UNICEF mendefinisikan Stunting sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi badan di bawah minus (Stunting sedang dan berat) dan minus tiga (Stunting kronis). Hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO.

Selain mengalami pertumbuhan terhambat, Stunting juga seringkali dikaitkan dengan penyebab perkembangan otak yang tidak maksimal. (Humas Sartdijito, 2019) Berdasarkan data statistik PBB, sejumlah 149 juta balita di dunia mengalami stunting, 6,3 juta diantaranya adalah balita Indonesia. Prevalensi stunting pada tahun ini ada pada rentang 21,6% dengan target menjadi 14% pada tahun depan. (PAUD Pedia, 2023). Provinsi Jawa Tengah telah berhasil menurunkan angka stunting hingga di angka 20,08%, lebih rendah dari prevalensi nasional. Namun, Jawa Tengah masih menjadi provinsi dengan kasus stunting terbesar nomor tiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. (Tempo Nasional, 2022)

Salah satu penyebab stunting yang paling terlihat ialah pola konsumsi dari sejak menjadi calon pengantin, hamil, melahirkan dan menyusui. Maka dari itu, BKKBN RI meluncurkan program DAHSAT. Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT) dilaksanakan di setiap kampung Keluarga Berkualitas (KB) dengan konsep fokus pada anak beresiko stunting. Para ahli gizi yang berasal dari dinas kesehatan atau puskesmas menyusun menu makan sehat dengan produk lokal yang ada, serta memberdayakan masyarakat untuk mencapai tujuan dari DAHSAT itu sendiri. Dari uraian program di atas, peneliti memilih DAHSAT yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Di setiap kebijakan baru, pasti tidak luput dari hambatan yang datang. Seperti kebijakan percepatan penurunan Stunting melalui program DAHSAT, tentu tidak lepas dari hambatan yang dihadapi. Hambatan dalam pelaksanaan DAHSAT ini dialami oleh para kader di Kampung KB yang diberdayakan untuk melaksanakan program tersebut. Kesulitan pelaksanaan Dahsat ini diantaranya minimnya dana yang didapatkan karena dana hanya bersumber dari swadaya masyarakat, kesibukan dan komunikasi yang kurang antar kader dan pemerintah, kemudian ketidak pastian menu makanan DAHSAT yang diberikan akan dikonsumsi oleh sasaran resiko atau tidak.

Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting selanjutnya disingkat TPPS melaksanakan Mini lokakarya audit kasus stunting yang bertujuan untuk menentukan desa dan kecamatan yang menjadi lokus audit sehingga

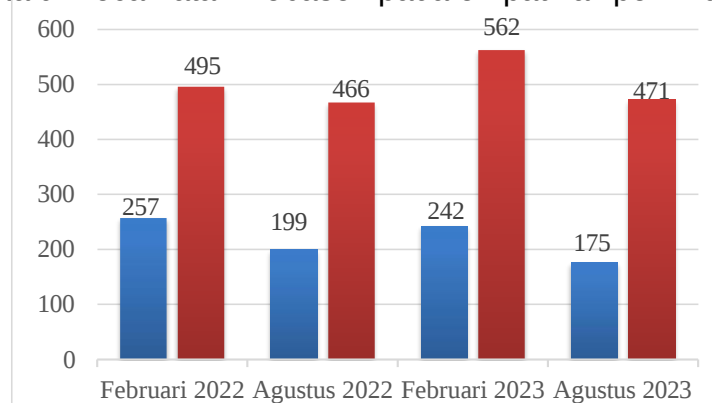
dapat menilai keberhasilan intervensi yang dilakukan. (TPPS Kab. Banyumas 2023)
Berikut ini merupakan data Desa lokus yang menjadi audit kasus stunting dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyumas.

Tabel 1. Desa Lokus Audit Stunting di Kabupaten Banyumas Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa
1	Sumbang	Karangturi
2	Kebasen	Bangsa
3	Kebasen	Sawangan
4	Kebasen	Adisana
5	Sumpiuh	Karanggedang
6	Sumbang	Susukan
7	Somagede	Sokawera
8	Sumbang	Datar
9	Sumbang	Gandatapa
10	Kembaran	Purbadana
11	Sumpiuh	Kradenan
12	Ajibarang	Kracak
13	Ajibarang	Darmakradenan
14	Ajibarang	Tipar Kidul

Sumber : Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kab. Banyumas 2023

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Kebasen menjadi salah satu lokus dalam audit kasus stunting, yang artinya kasus stunting di Kecamatan Kebasen perlu pemeriksaan dan perhatian cukup serius bagi pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, hasil penimbangan serentak di Puskesmas Kebasen prevalensi bayi di bawah dua tahun yang selanjutnya disingkat baduta yang terindikasi stunting juga prevalensinya tertinggi diantara puskesmas lain. Berikut ini merupakan grafik kondisi baduta dan balita di Kecamatan Kebasen pada empat kali penimbangan serentak.



Gambar 1. Grafik Balita & Baduta Stunting Tahun 2022-2023

Sumber : PLKB Kecamatan Kebasen 2023 Keterangan :

Sajian data di atas menggambarkan bahwa indikasi stunting mengalami kenaikan dari Agustus 2022 ke Februari 2023. Kenaikan ini terjadi kemungkinan karena ada beberapa faktor seperti penambahan jumlah baduta yang baru lahir dan belum optimalnya pelaksanaan program DAHSAT. Untuk lebih memantau resiko terjadinya stunting, TPK telah melakukan pendampingan, pemantauan dan intervensi kepada keluarga beresiko stunting di wilayahnya masing-masing. Salah satu hasil dari laporan mereka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Pendampingan TPK Kec. Kebasen September 2023

No	Desa	Bumil Beresiko Stunting	Bumil Beresiko Stunting Gakin	Baduta Beresiko stunting	Baduta Beresiko Stunting Gakin
1	Adisana	12	0	22	10
2	Bangsa	9	2	10	8
3	Karangsari	7	0	13	2
4	Randegan	6	1	8	2
5	Kaliwedi	16	3	24	2
6	Sawangan	3	0	0	0
7	Kalisalak	19	2	23	0
8	Cindaga	20	4	49	7
9	Kebasen	12	5	15	6
10	Gambarsari	2	3	4	1
11	Tumiyang	4	2	1	0
12	Mandirancan	5	1	6	3
	JUMLAH	115	23	175	41

Sumber : PLKB kec. Kebasen 2023

Mencermati tabel di atas, hampir semua desa di Kecamatan Kebasen masih ada ibu hamil dan bayi di bawah dua tahun (baduta) beresiko stunting yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu. Kondisi ini tentu perlu perhatian pemerintah dan masyarakat secara umum.

Menurut permasalahan dalam data empiris di atas, peneliti tertarik untuk mengambil contoh pelaksanaan DAHSAT di dua Desa yaitu Desa Bangsa dan Desa Cindaga. Terkait dengan pelaksanaan program DAHSAT tersebut, Desa Bangsa merupakan lokus audit kasus stunting Kabupaten Banyumas, sedangkan Desa Cindaga adalah Desa dengan angka resiko stunting yang cukup tinggi di Kecamatan Kebasen. Pelaksanaan DAHSAT di dua desa tersebut juga berbeda. Desa Bangsa

melaksanakan program DAHSAT dengan sumber dana berasal dari Muslimat NU dan dilaksanakan oleh kader di Kampung KB, sedangkan di Desa Cindaga dengan sumber dana Kampung KB dan dilaksanakan oleh Kader Kampung KB bersama PKK.

Dari beberapa fenomena dan permasalahan di atas, peneliti berasumsi semakin baik pelaksanaan DAHSAT, harapannya akan mampu mengatasi dan mempercepat penurunan stunting sesuai target pemerintah. Apabila pelaksanaan DAHSAT kurang optimal, akan ada kemungkinan orangtua baduta memberikan menu konsumsi seadanya, tidak memperhatikan kandungan gizi seimbang yang dibutuhkan tubuh, sehingga keluarga beresiko stunting yang kurang mampu akan tidak kunjung membaik dan prevalensi stunting di Kecamatan Kebasen akan sulit menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Natelda L. Timisela et all (2023) menunjukkan bahwa Program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) sebagai program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang untuk mengubah pola perilaku masyarakat untuk menyiapkan gizi seimbang dari dalam keluarga. Dalam penelitian ini bukan berfokus pada pemberdayaan masyarakat di kampung KB, namun lebih fokus pada implementasi program DAHSAT di Desa Bangsa dan Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Program Dapur Sehat Atasi Stunting di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas"

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2004: 3). Lokasi penelitian adalah Kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga tahap, pertama wawancara mendalam, kedua observasi, dan ketiga dokumentasi. Penelitian ini menggunakan atau mengambil model analisis interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014:13) dengan empat komponen analisis yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data. dan menarik kesimpulan (*Conclusions Drawing*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Dapur Sehat Atasi Stunting di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas yang peneliti lakukan ditinjau dari teori menurut George C. Edward III yang terdiri dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut merupakan uraiannya, Sesuai dengan yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Widodo (2010) bahwa kebijakan publik disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung:

Aspek Komunikasi

Aspek komunikasi dalam Implementasi Program Dapur Sehat Atasi Stunting di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan sudah dilaksanakan. Dalam hal intensitas komunikasi yang dilakukan pun tidak hanya sekali dua kali, namun berkelanjutan dengan harapan program DAHSAT dapat dimaknai oleh masyarakat dengan sesungguhnya.

Dalam buku psikologi komunikasi disebutkan adanya komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Komunikasi interpersonal kaitannya dengan persepsi, bagaimana individu memahami individu lain, mempersepsi orang lain, dan menduga perilaku orang lain. Sedangkan komunikasi kelompok berkaitan dengan aktivitas manusia sebagai anggota kelompok, komunikasi antar kelompok dilakukan untuk bertukar informasi, menambah pengetahuan dan mengubah sikap perilaku (Rakhmat 2003:140). Komunikasi interpersonal dalam program DAHSAT dilaksanakan dari implementor (kader) kepada sasaran (penerima DAHSAT). sedangkan komunikasi antar kelompok contohnya dari PLKB kepada tim DAHSAT.

Jadi, aspek komunikasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III merupakan aspek yang pertama dan paling utama dalam implementasi kebijakan atau program, karena komunikasi akan menjiwai dan mempengaruhi aspek-aspek yang lain. Pada proses tranmisi atau penyampaian informasi program dari implementor kepada sasaran ada sedikit perbedaan antara Desa Bangsa dan

Desa Cindaga. Implementor di Desa Bangsa merupakan tim DAHSAT yang berasal dari PPKBD, sedangkan di Desa Cindaga berasal dari TP PKK.

Selanjutnya, metode sosialisasi (komunikasi) yang digunakan di dua desa tersebut hampir sama, yaitu edukasi, advokasi dan koordinasi. Sedikit berbeda di Desa Bangsa karena untuk berkomunikasi kepada sasaran, implementor menggunakan teknologi informasi untuk mempercepat komunikasi melalui WhatsApp Group, sedangkan di Desa Cindaga tidak.

Intensitas komunikasi yang dilakukan di Desa Bangsa dan Desa Cindaga sama. Komunikasi interpersonal antara implementor dan sasaran yaitu seminggu sekali setiap hari jumat, sedangkan komunikasi kelompok (tim DAHSAT dan PLKB atau pemerintah) dilaksanakan setiap sebulan sekali dan rembug stunting satu tahun tiga kali.

Aspek Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam proses implementasi kebijakan, karena SDM dapat menggerakkan sumber daya yang lain. Pada teori yang dikemukakan oleh Grindle (1980) bahwa proses implementasi akan dimulai jika program telah tersusun dan dana telah siap disalurkan untuk mencapai tujuan. Ini selaras dengan adanya anggaran yang sudah dikeluarkan Desa Bangsa untuk program DAHSAT dan sedikit tidak selaras dengan Desa Cindaga karena pada tahun 2023 Desa Cindaga belum mengeluarkan anggaran program DAHSAT.

George C. Edward III dalam Firmansyah (2023) mengemukakan bahwa sarana dan prasarana juga merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam implementasi kebijakan, tersedianya gedung, peralatan dan penunjang lainnya guna mendukung implementasi kebijakan. Ini sangat tidak sejalan dengan jawaban informan yang menyatakan bahwa peralatan memasak untuk DAHSAT masih menggunakan milik pribadi kader, jadi tidak ada peralatan memasak atau dapur khusus yang tersedia.

Terakhir, pada sub aspek sumber daya kewenangan, di tingkat kecamatan PLKB memberi arahan dan motivasi saja karena sifat dari DAHSAT adalah

koordinatif, sedangkan di tingkat desa yang mengkoordinir adalah ketua TP PKK, ini sesuai dengan teori Van Meter Van Horn dalam Firmansyah (2023) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat/kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan tercapainya tujuan dalam keputusan kebijakan.

Aspek Disposisi

Aspek disposisi dalam Implementasi Program Dapur Sehat Atasi Stunting di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Firmansyah (2023) yaitu bahwa disposisi yang dimaksud adalah sikap para pelaksana kebijakan dalam upaya keberhasilan implementasi kebijakan, sikap tersebut dapat berupa sikap jujur, komitmen dan bertanggung jawab dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam implementasi program dapur sehat atasi stunting di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas aspek disposisi belum berjalan dengan maksimal. Sudah ada komitmen dan kepekaan implementor dalam pelaksanaan program DAHSAT dengan sumber daya yang terbatas tetapi harus mampu memberi asupan gizi seimbang kepada sasaran, namun justru di Desa Cindaga belum ada perhatian pemerintah Desa karena belum ada anggaran dana yang turun padahal pimpinan di Desa tersebut adalah perempuan yang sepantasnya lebih memperhatikan hal-hal demikian.

Kegiatan telah dilaksanakan sudah sesuai guide line yang ditetapkan dan ada proses sharing antara implementor dan kelompok sasaran, artinya pelaksanaan program DAHSAT sudah menjunjung nilai demokratis. Karena nilai-nilai demokratis selalu berkaitan erat dengan bagaimana cara berkomunikasi, mendengarkan keluhan sasaran dan berusaha mencari solusi yang dihadapi bersama.

Pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Bangsa dan Desa Cindaga sama. Pendidikan formal para kadernya rata-rata SMP- SMA. Meskipun tidak menempuh pendidikan tinggi, para kader sudah seringkali mendapat

pembekalan berupa pelatihan memasak bersama BKKBN dan ahli gizi menu gizi seimbang, sehingga kader mampu untuk melaksanakan program DAHSAT.

Pada sumber daya anggaran yang ada di Desa Bangsa dan Desa Cindaga berbeda. Di Desa Bangsa, sumber anggaran ada yang berasal dari Desa sejumlah Rp.8.100.000, Muslimat Rp.500.000 dan iuran warga masyarakat Rp.2.400.000. Sedangkan di Desa Cindaga, anggaran dari desa tidak ada, sehingga menggunakan kas PKK sejumlah Rp.2.400.000 dan Posyandu Rp.600.000. Karena keterbatasan anggaran di Desa Cindaga, sehingga muncul kepedulian (rasa peka) dari para kader untuk memberikan beras secara bergantian setiap pokja demi keperluan program DAHSAT, sedangkan di Desa Bangsa tidak. Jadi, sumber daya anggaran pelaksanaan program DAHSAT di dua desa yang diteliti berbeda-beda. Ada desa yang berusaha mengalokasikan anggarannya, ada yang tidak. Namun demikian, ada sebagian masyarakat yang peduli walaupun desa secara administratif tidak mengeluarkan anggaran untuk keperluan program DAHSAT.

Sumber daya peralatan yang dipakai dalam proses kegiatan di dua desa sama yaitu alat memasak dan alat mengemas makanan, namun alat masak yang digunakan di Desa Bangsa itu milik pihak ketiga, sedangkan alat masak di Desa Cindaga adalah milik pribadi kader. Kemudian, sumber daya kewenangan atau yang berwenang mengambil keputusan dan memberikan instruksi yaitu dari Ketua TP PKK, namun untuk pelaksana program DAHSAT di dua desa itu berbeda, di Desa Bangsa yaitu PPKBD, sedangkan di Desa Cindaga yaitu PKK.

Aspek Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi terdiri dari dua sub aspek yaitu ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan struktur organisasi. Kedua hal ini sangat berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. SOP atau mekanisme pelaksanaan kegiatan merupakan pedoman yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan atau program sedangkan struktur organisasi merupakan susunan pembagian tugas implementor.

Adanya struktur birokrasi pada implementasi suatu program bertujuan untuk memudahkan pada pembagian tugas dan fungsi serta memiliki hak dan kewajiban masing-masing pelaksana kegiatan. Struktur birokrasi juga memudahkan penyampaian kendala atau masalah yang dihadapi implementor untuk kemudian dikomunikasikan kepada pimpinan.

Pada teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III, aspek struktur birokrasi terdapat 2 sub aspek yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Struktur Birokrasi beserta tugas dan fungsinya. Teori tersebut tidak selaras dengan yang ada di lapangan karena sesuai jawaban informan belum ada SOP khusus yang memberikan petunjuk teknis pelaksanaan program DAHSAT, hanya ada arahan saja sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kemudian pada sub aspek struktur organisasi juga tidak selaras dengan pelaksanaan, karena seharusnya strukturnya merupakan tim DAHSAT, namun karena belum ada SK sehingga masih menggunakan struktur PPKBD.

Ketersediaan SOP DAHSAT di dua desa tersebut dinyatakan belum ada, namun masing-masing tim DAHSAT di Desa Bangsa dan Desa Cindaga sudah menyusun alur pelaksanaan sebagai pedoman program DAHSAT masing-masing. Yang menjadi pembeda ialah apabila di Desa Bangsa makanan DAHSAT dipesan melalui pihak ketiga, setelah itu langsung di distribusikan. Sedangkan di Desa Cindaga makanan DAHSAT dimasak oleh kader PKK bergantian setiap minggunya satu pokja, setelah itu baru didistribusikan. Pedoman yang mereka gunakan masih mengikuti arahan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Struktur birokrasi di Desa Bangsa berkaitan dengan pelaksana program DAHSAT yaitu PPKBD yang tertuang pada Keputusan Kepala Desa Bangsa Nomor 141.2/8/2024, sedangkan di Desa Bangsa tertulis dalam Keputusan Kepala Desa Cindaga Nomor 09 Tahun 2016.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Dapur Sehat Atasi Stunting di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, maka diperoleh kesimpulan sebagai

berikut bahwa komunikasi dalam implementasi program DAHSAT di Desa Bangsa dan Desa Cindaga dapat disimpulkan sudah dilaksanakan baik dengan dilihat proses tranmisi, komunikasi implementor kepada sasaran maupun antar implementor dan pemerintah, baik inter personal maupun kelompok. Metode sosialisasi yang digunakan pada program sudah tepat melalui edukasi face to face dari implementor kepada sasaran, koordinasi dan advokasi dari implementor kepada pemerintah. Sedangkan intensitas komunikasi yang dilakukan tidak hanya sekali dua kali, namun setiap minggu selalu ada komunikasi. Bahkan, di Desa Bangsa sudah ada terobosan komunikasi melalui WhatsApp Group demi mempercepat komunikasi, sedangkan di Desa Cindaga belum ada. Sementara, Sumber daya dalam implementasi program DAHSAT dapat disimpulkan kurang memadai, terutama pada sub aspek sumber daya anggaran. Hal ini terbukti bahwa jumlah anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah sasaran resiko. Sumber anggaran di Desa Bangsa yang berasal dari APBDes sedangkan di Desa Cindaga belum mengalokasikan. Sumber anggaran lain berasal dari organisasi masyarakat, di Bangsa dari Muslimt NU, sedangkan di Cindaga dari PKK dan posyandu. Kemudian, pada sub aspek sumber daya manusia sudah memadai meskipun pendidikan formal tidak tinggi tetapi sudah memperoleh pelatihan, sumber daya peralatan juga sudah memadai dan sumber daya kewenangan sudah sesuai dan dilaksanakan dengan baik oleh ketua TP PKK.

Disposisi dalam implementasi program DAHSAT dapat disimpulkan kurang tepat karena implementor sudah melaksanakan kegiatan sesuai guide line yang ditetapkan, implementor memiliki sikap yang komitmen, ramah, sabar, disiplin serta bertanggungjawab atas pelaksanaan program. Namun, pemerintah Desa Cindaga nampaknya belum memiliki komitmen tersebut karena belum mengalokasikan anggarannya untuk program DAHSAT. Selain itu, pada tingkat demokratis, sudah ada ada proses sharing yang merepresentasikan sebuah sikap demokratis.

Struktur Birokrasi dalam implementasi program DAHSAT dapat disimpulkan kurang tepat karena belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus program DAHSAT, masih sekedar mengikuti arahan BKKBN dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 sehingga para implementor membuat alur pelaksanaan secara mandiri. Selain itu, juga belum adanya legalitas stuktur organisasi tim DAHSAT, masih

menggunakan struktur organisasi Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD).

REFERENSI

- Abdul, A., Fitri, A. H., Sari, A. M., Gistituati, N., & Rusdinal, R. Stages Of Making Public Policy AS The Basis Of Policy Makers. *Jurnal Muara Pendidikan*, 7(1), 148-155.
- Afnita, I. D. Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Perintah Membayar Bidang Keuangan Apbn Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 8(2), 142-150.
- Arikunto, S. (2010). *Metode peneltian*. Jakarta: Rineka Cipta, 173.
- Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (2021). Diakses pada Senin, 16 Oktober 2023 dari <https://www.bkkbn.go.id/berita-luncurkan-dashat-bkkbn-optimis-stunting-teratasi>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas (2021). Kecamatan Kebasen dalam Angka 2021.
- Dalimunthe, Y. P., & Susilawati, S. (2022). Implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kota Medan menggunakan teori edward III. *FLORONA: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1(2), 59-64.
- Dermawan @ all. 2022. Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Asahan. *Jurnal Bangun Abdmas Vol 1 No 2*.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (2023).
- Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (2023). Diakses pada Jumat, 20 Oktober 2023 dari <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/149-juta-anak-di-dunia-alami-stunting-sebanyak-63-juta-di-indonesia-wapres-minta-keluarga-prioritaskan-kebutuhan-gizi?d>.
- Erlin, Y. V. (2022). *Politik Anggaran Desa Untuk Penanganan Covid-19 (Penelitian di Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta) (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD" APMD")*.
- Firdaus, I., Fuad, A., & Riswanda, R. (2019). *Implementasi Kebijakan E-KTP Di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)*.
- Firmansyah, 2023 *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kepada Masyarakat Di Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Universitas Wijayakusuma Purwokerto*

- Humas Sardjito. 2019. Kenali Penyebab Stunting Anak. Yogyakarta : RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
- Indiahono (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta : Penerbit Gaya Media.
- Kusumaningtyas, A. N. (2022). Implementasi Penggunaan Aplikasi Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi (Serabi) Kabupaten Pemalang Tahun 2019. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(3), 234-249.
- NAJAH, F. R. (2020). Resiliensi Remaja Broken Home Dalam Meraih Kebahagiaan Di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. *Bimbingan dan konseling*, 1717101013, 1.
- Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Kebasen (2023).
- Putra Erick Purnama (2023). Diakses pada Jumat, 20 Oktober 2023 dari <https://news.republika.co.id/berita/rv6z4w484/angka-stunting-di-jawa-tengah-masih-di-angka-208-persen>.
- Rakhmat Jalaludin (2003). Psikologi Komunikasi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Sabilla, A. A., & Kriswibowo, A. (2021). Implementation Of The Principles Of Good Governance In Combating Stunting In The Jabon District, Sidoarjo Regency. *DiA: Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 53-67.
- Sadhana, K. (2011). Realitas Kebijakan Publik.
- Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banyumas (2023). Situmorang, L. S. (2023). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi Kasus di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Sulanjari @all, 2023. Efektivitas Komunikasi Media Sosial Dalam Memahami Peran Elsimil Untuk Menekan Angka Stunting Di Indonesia. *Jurnal Egaliter Vol 7*. Universitas Pandanaran Semarang
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tempo Nasional (2022). Diakses pada Jumat, 20 Oktober 2023 dari <https://nasional.tempo.co/read/1683885/angka-stunting-di-indonesia-masih-tinggi-ini-5-provinsi-dengan-kasus-stunting-terbanyak>
- Tifannii, W. F., Mayasari, M., & Rifai, M. (2020). Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Upaya Menekan Pertumbuhan Penduduk di

- Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(3), 525-540.
- Timisela, N. R., Leatemia, E. D., Polnaya, F. J., Kembauw, E., Mailoa, M., Nurjannah, N., ... & Ayhuan, S. A. (2023). Implementasi Pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), 572-576.
- Ulfa, 2023 Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Universitas Wijayakusuma Purwokerto
- Vista Afdira, V. (2023). Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting (Pepes) Dalam Menurunkan Angka Stunting Di Kecamatan Bagan
- Sinembah Raya (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Yunifar, A. T., Kusbandrijo, B., & Puspaningtyas, A. (2023). Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Surabaya. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 3(04), 254-264.
- Zahara, A., Nirzalin, N., & Abubakar, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 1(1), 1-10.
- Peraturan Perundang-Undangan :
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting